

Alasan Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan dalam Prinsip Kerja Sama Grice pada Budaya Masyarakat Riau

Fatmawati, Rika Ningsih

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a gap between the concept of Grice's cooperative principle and its application in the culture of the Riau people. The problem in this research is what is the reason for the violation of the maxim of manner in the culture of the Riau people? This study uses a qualitative approach with the grounded theory method. Informants in this study amounted to 79 informants who came from a number of districts in Riau and Riau Islands. The data analysis technique in this study consisted of three stages, namely: open coding, axial coding, and selective coding. The conclusion of this research shows that cultural differences make Grice's principle of cooperation, especially the maxim of manner, not universally applicable to all languages. There are a number of reasons for violating the maxim of manner, namely reasons of politeness, confusion in giving answers, forgetting, nervousness, empathy, avoiding direct speech, secrets, substitute vocabulary, pleasantries, pleasantries, lying, habits, and upset/angry. Violation of Grice's cooperative principle is not a bad thing, in fact the violation occurs because of the cultural influence that exists in the language. The violation of Grice's maxim of cooperation in a language is a manifestation of the actual principle of cooperation in that language.

Universitas Islam Riau, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Submitted 07 Agustus 2022

Revised 09 Agustus 2022

Accepted 09 Agustus 2022

KEYWORDS

maxim, Grice's teamwork principle, community culture

CITATION (APA 6th Edition)

Fatmawati, Rika Ningsih. (2022). Alasan Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan dalam Prinsip Kerja Sama Grice pada Budaya Masyarakat Riau . *Sintaks: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), Page: 130 – 136

*CORRESPONDANCE AUTHOR

fatmawati@edu.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Peristiwa tutur merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Supaya penutur dapat diterima dengan baik dalam suatu peristiwa tutur, penutur harus mengikuti dan mematuhi konvensi-konvensi kebahasaan yang berlaku. Konvensi-konvensi kebahasaan tersebut antara lain: seorang penutur harus kooperatif, santun, runtun dalam berbicara, menggunakan bahasa dengan benar, memberi perhatian kepada mitra tutur dan menghargainya, serta memperhatikan situasi di sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Zhao (2015) yang menyatakan bahwa untuk memastikan percakapan berjalan lancar, dua pembicara harus mematuhi beberapa prinsip dasar, terutama prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama disajikan dalam empat maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara/pelaksanaan (Grice: 1991). Namun, dalam peristiwa tutur tidak selamanya tuturan yang disampaikan memenuhi maksim-maksim dalam prinsip kerja sama Grice. Beberapa permasalahan sosial bisa menyebabkan pelanggaran terhadap maksim-maksim dalam prinsip kerja sama Grice.

Sebagai individu yang diciptakan berbeda dan memiliki pemikiran serta kepentingan yang berbeda, perbedaan pandangan dan pemahaman akan senantiasa terjadi. Menurut Zienkowski, Osman, & Verschueren (2011), semua lelucon melibatkan pelanggaran satu atau lebih maksim Grice. Hal tersebut sejalan dengan hasil

131 | Alasan Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan dalam Prinsip Kerja Sama Grice pada Budaya Masyarakat Riau penelitian Rochmawati (2017) yang menyimpulkan bahwa humor atau lelucon menghadirkan pelanggaran maksim kerja sama yaitu maksim *quality*, *quantity*, *manner*, dan *relevance*. Selanjutnya, Lili (2012) dalam artikelnya menyatakan bahwa alasan pelanggaran maksim-maksim prinsip kerja sama bisa juga karena seseorang mencoba memberi informasi tambahan dan tidak sengaja membuat masalah dalam interaksi sosial.

Masih terkait dengan alasan pelanggaran prinsip kerja sama, Norwanto (2006) menyatakan bahwa politisi mengabaikan prinsip-prinsip kerja sama secara rutin. Politisi melanggar maksim kuantitas untuk mengungkapkan komitmen kuat atau menyembunyikan informasi. Politisi juga memberikan informasi yang salah dan melanggar maksim kualitas. Selain itu, politisi juga mengabaikan maksim relevansi dengan mengatakan sesuatu yang tidak terkait topik yang sedang dibahas. Lebih luas, Chaer (2010) menyatakan bahwa alasan pelanggaran maksim prinsip kerja sama dikarenakan beberapa hal, yakni: adanya keinginan dari peserta tutur untuk memberikan kontribusi yang lebih dalam pertuturan, reaksi terhadap jawaban mitra tutur, keinginan untuk membuat suasana menjadi lucu atau menimbulkan efek humor, dan adanya usaha untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi samar.

H. Tupan & Natalia (2008) dalam artikelnya menjelaskan ketika orang-orang melakukan pelanggaran maksim, mereka tampaknya memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Di dalam penelitiannya, ditemukan bahwa tokoh dalam film *Desperate Housewives* melakukan pelanggaran maksim sebagai strategi untuk berbohong. Alasan berbohong bervariasi dari tokoh satu dengan yang lainnya sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Pelanggaran terhadap maksim juga terjadi karena tokoh ingin menghilangkan kemungkinan lawan bicara untuk merespons sehingga lawan bicara tidak mengajukan pertanyaan lagi sehingga tokoh tersebut dapat mencapai tujuannya dengan mudah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa maksim-maksim dalam prinsip kerja sama Grice mengalami pelanggaran karena beberapa alasan. Konteks dalam sebuah pertuturan akan sangat memengaruhi tuturan yang dituturkan. Misalnya dalam konteks bercanda, penutur bisa saja menggunakan tuturan-tuturan yang menonjolkan aspek kelucuan. Menurut Lili (2012), dalam interaksi sosial, humor diperlakukan sebagai pelumas karena dapat membantu meredakan ketegangan sosial, menyampaikan niat ramah, dan memperkuat ikatan sosial. Namun, aspek kelucuan biasanya berimbas pada pelanggaran maksim prinsip kerja sama.

Fenomena di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait alasan pelanggaran prinsip kerja sama Grice khususnya untuk maksim cara/pelaksanaan. Pemilihan maksim cara/pelaksanaan sebagai fokus penelitian dikarena maksim ini merupakan maksim yang sering dilanggar. Dalam maksim kerja sama yang disajikan Grice, menyarankan beberapa submaksim, yakni: hindari ketidakjelasan ekspresi; hindari ambiguitas; jadilah singkat (hindari pernyataan-pernyataan yang panjang lebar dan bertele-tele); dan berbicaralah secara teratur. Sejalan dengan Grice, Brown & Levinson (1987) menyatakan konsep maksim cara/pelaksanaan atau pelaksanaan adalah *Be perspicuous: avoid ambiguity and obscurity*. Wijana & Rohmadi (2010) menyatakan bahwa maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Chaer (2010) bahwa maksim cara atau pelaksanaan mengharuskan penutur dan lawan tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak ambigu, tidak berlebih-lebihan, dan runtut. Sejalan dengan pendapat di atas, Wenzhong & Jingyi (2013) menyatakan bahwa untuk mencapai kejelasan, maksim cara/pelaksanaan memiliki empat submaksim, yaitu hindari ketidakjelasan ekspresi, hindari ambiguitas, usahakan agar ringkas, dan usahakan agar berbicara dengan teratur.

Konsep maksim cara/pelaksanaan di atas akan mengalami benturan jika diterapkan pada budaya masyarakat Riau. Perbedaan konteks budaya yang terdapat pada suatu bahasa akan sangat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sobhani & Saghebi (2014) bahwa sejak kemunculan prinsip kerja sama, beberapa peneliti telah memperdebatkan universalitasnya dengan alasan bahwa prinsip kerja sama, sama dengan kebanyakan perilaku sosial yang sangat ditentukan secara budaya. Oleh karena itu, tidak dapat diterapkan secara universal karena adanya perbedaan antarbudaya. Bagi masyarakat tutur Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran seperti keramah-tamahan, akan terasa sangat kaku jika harus menerapkan prinsip kerja sama yang disarankan oleh Grice. Jika prinsip tersebut dipaksakan untuk diterapkan dalam konteks budaya Indonesia, justru akan berdampak pada kesantunan komunikasi yang berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Leech, (1983) bahwa mengenai kesemestaan bahasa prinsip kerja sama tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama pada semua masyarakat bahasa. Leech juga menyatakan bahwa

dengan adanya perbedaan penerapan prinsip kerja sama Grice tersebut perlu ada satu bidang ilmu yang khusus yakni sosio-pragmatik. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat-masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda menggunakan maksim-maksim prinsip kerja sama Grice. Misalnya, ada masyarakat yang dalam situasi tertentu lebih mementingkan prinsip kesopanan daripada prinsip kerja sama.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan data yang ada di lapangan, perlu disusun metodologi penelitian yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*. Dalam pendekatan kualitatif peneliti mengumpulkan data-data penting secara terbuka terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 79 informan yang berasal dari sejumlah kabupaten di provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui rekaman percakapan dan wawancara semistruktur kepada informan yang berasal dari Pekanbaru, Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Selat Panjang, Dumai, Siak, Indragiri Hilir, Bengkalis, Teluk Kuantan, Kuansing, Kepulauan Riau. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. Tahap-tahap tersebut adalah tahap koding terbuka (*open coding*), koding berporos (*axial coding*), dan koding selektif (*selective coding*).

PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik pengumpulan data, ditemukan konsep-konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Berdasarkan tahap *open coding*, diperoleh 36 konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1. Tanda strip (-) yang berada pada kolom teori menunjukkan bahwa dalam teori yang dikemukakan oleh Grice, belum ada konsep yang mewakili konsep yang berada pada kolom temuan penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep-konsep yang berada di kolom temuan penelitian merupakan temuan orisinal peneliti terkait dengan alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan.

Tabel 1. Alasan Pelanggaran Maksim Cara/Pelaksanaan Berdasarkan Teori dan Berdasarkan Temuan Penelitian

Teori	Temuan Penelitian
-	➤ Karena gugup
-	➤ Suasana tegang
-	➤ Paham konteks
-	➤ Menggunakan bahasa kiasan
-	➤ Deg-degan
-	➤ Lupa
-	➤ Groggi
-	➤ Supaya dibantu
-	➤ Untuk mendapat simpati
-	➤ Menjaga rahasia
-	➤ Supaya mitra tutur tidak malu
-	➤ Kekurangan kosakata
-	➤ Kebiasaan
-	➤ Berbohong karena ingin menutupi sesuatu
-	➤ Menjaga nama baik mitra tutur
-	➤ Menyembunyikan sesuatu
-	➤ Bingung memberikan jawaban
-	➤ Santun
-	➤ Tidak memiliki jawaban yang pasti
-	➤ Berharap mitra tutur mau meminjamkan
-	➤ Memastikan keadaan
-	➤ Tidak kasar
-	➤ Memilih kosakata yang paling tepat
-	➤ Supaya tidak langsung pada topik
-	➤ Mengganti kosakata tertentu

-	➤ Supaya lebih halus
-	➤ Takut
-	➤ Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan
-	➤ Tuturan menjadi panjang
-	➤ Marah/kesal
-	➤ Pengganti kosakata yang dianggap tabu
-	➤ Basa-basi
-	➤ Supaya orang di luar percakapan tidak mengetahui
-	➤ Memberikan pilihan
-	➤ Mencairkan suasana
-	➤ Ada maksud tertentu

Konsep-konsep alasan pelanggaran yang sudah dihimpun di atas dilakukan *constant comparison* untuk mengelompokkan konsep-konsep yang memiliki kesamaan dalam satu kategori. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan kategori-kategori yang lebih abstrak. Pada tahap ini, tahapan analisis data penelitian *grounded* yang kedua yakni tahap *axial coding* diterapkan. Pada tahap *axial coding*, dirumuskan dua belas kategori konsep-konsep alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Dua belas kategori yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kategori Konsep-konsep Alasan Pelanggaran Maksim Cara/ Pelaksanaan

Kategori	Konsep
Kesantunan	<ul style="list-style-type: none"> - Santun - Tidak kasar - Supaya lebih halus - Memastikan keadaan - Menggunakan bahasa kiasan
Bingung memberikan jawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Bingung memberikan jawaban - Tidak memiliki jawaban yang pasti
Lupa	<ul style="list-style-type: none"> - Lupa - Kekurangan kosakata
Gugup	<ul style="list-style-type: none"> - Suasana tegang - Karena gugup - Deg-degan - Grogi - Takut
Empati	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan simpati - Supaya dibantu - Berharap mitra tutur mau meminjamkan
Menghindari tuturan langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Supaya tidak langsung pada topik - Paham konteks
Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Menyembunyikan sesuatu - Supaya orang di luar percakapan tidak mengetahui - Menjaga rahasia
Kosakata pengganti	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih kosakata yang paling tepat - Menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan - Menjaga nama baik mitra tutur - Supaya mitra tutur tidak malu - Mengganti kosakata tertentu - Pengganti kosakata yang dianggap tabu

Basa-basi	<ul style="list-style-type: none"> - Tuturan menjadi panjang - Basa-basi - Memberikan pilihan - Ada maksud tertentu - Mencairkan suasana
Berbohong	- Berbohong karena ingin menutupi sesuatu
Kebiasaan	- Kebiasaan
Marah/Kesal	- Marah/kesal

Di bawah ini dicantumkan contoh bagaimana kategori-kategori pada tabel di atas muncul setelah melalui proses analisis *constant comparison*. Contoh pertama adalah proses munculnya kategori alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan kategori **Kesantunan**, yang muncul dari kutipan wawancara berikut ini.

Informan 34 mengatakan:

*Karena saya tidak tahu secara pasti alamatnya, **alasanya biar lebih santun.***

Informan 76 mengatakan:

***Supaya lebih santun** dan saya mau meminjamkannya.*

Informan 77 mengatakan:

***Supaya lebih santun** dan ibu **saya tidak marah** dan saya mendapatkan izin karena sudah tahu apa alasan saya tidur di rumah teman.*

Analisis: Dalam maksim cara/pelaksanaan, Grice meminta peserta tutur untuk menyampaikan tuturan dengan jelas, singkat, tidak ambigu, serta runut. Namun, berdasarkan hasil wawancara terhadap 79 orang informan, sebagian besar mereka menyatakan bahwa dalam konteks tertentu mereka sengaja mengatakan tuturan yang panjang, berbelit-belit, ambigu, serta disampaikan secara tidak langsung karena alasan kesantunan. Mereka menyatakan tuturan yang panjang merupakan wujud dari kesantunan, terutama pada saat menginginkan sesuatu dari orang lain misalnya pada saat meminjam uang. Selain itu, pada konteks tertentu, tuturan yang ambigu justru dipilih supaya tuturan menjadi lebih santun seperti saat mengatakan kalimat 'merah putih' sebagai pengganti kalimat 'di gigimu ada cabe'. Selain itu, penggunaan kata 'anu' juga sering dipilih untuk pengganti kosakata yang dianggap tabu untuk diucapkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Citra & Fatmawati (2021) yang menyatakan bahwa salah satu alasan pelanggaran maksim adalah karena ada usaha untuk terlihat lebih santun. Namun, meskipun terjadi pelanggaran maksim lawan tutur tidak mempermasalahkannya dan percakapan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, Rahmawati (2021) menyebutkan bahwa alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan adalah adanya keinginan untuk memberikan penjelasan atau informasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, kecenderungan informan menggunakan tuturan yang panjang, taksa, dan cenderung berbelit-belit adalah upaya agar tuturan yang disampaikan terkesan santun. Upaya agar tuturan menjadi santun tersebut justru menjadi penyebab pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Banyak konteks-konteks percakapan yang menghendaki agar tuturan disampaikan secara tidak langsung, ambigu, dan berbelit-belit, agar menjadi santun berdasarkan budaya. Hal yang paling sering diungkapkan oleh informan adalah saat menginginkan sesuatu dari mitra tutur dan saat menyampaikan sesuatu yang dianggap tabu dalam budaya mereka.

Contoh kedua adalah proses munculnya kategori alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan kategori **Basa-basi**, yang muncul dari kutipan wawancara berikut.

Informan 36 mengatakan:

***Alasanya untuk basa-basi**, supaya yang bersangkutan mau memberikan pinjaman.*

Informan 39 mengatakan:

*Alasanya ada **basa-basi** saat mau minjam karena segan Bu kalau langsung-langsung.*

Informan 40 mengatakan:

*Alasanya ada **basa-basi** saat mau minjam karena segan Bu kalau langsung-langsung, mana tahu yang bersangkutan sedang tidak ada uang, jadi ditanya dulu.*

Analisis: Dalam maksim cara/pelaksanaan, Grice meminta peserta tutur untuk menyampaikan tuturan dengan jelas, singkat, tidak ambigu, serta runut. Namun, sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam konteks tertentu mereka sengaja mengatakan tuturan yang panjang dan cenderung berbelit-belit sebagai wujud basa-basi. Berdasarkan latar belakang budaya informan, memang budaya basa-basi ini masih sering digunakan. Hal ini sebenarnya juga berkaitan dengan kesantunan. Informan mengatakan bahwa mereka melakukan basa-basi agar suasana menjadi lebih akrab sehingga tujuan pembicaraan bisa terwujud. Basa-basi ini menyebabkan tuturan menjadi lebih panjang karena pembicaraan tidak langsung pada topik. Namun, para informan sepakat bahwa mereka lebih menyukai orang yang pandai berbasa-basi dalam percakapan.

Berdasarkan analisis data, alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan kategori Basa-basi masih terkait dengan kesantunan. Saat menginginkan sesuatu dari orang lain, dalam budaya mereka ada etika yang harus dilakukan. Salah satunya adalah berbasa-basi. Tujuannya adalah agar apa yang menjadi hajatnya bisa terealisasi. Basa-basi tersebut akan menyebabkan tuturan menjadi panjang sehingga bertentangan dengan maksim cara/pelaksanaan Grice yang justru meminta agar tuturan disampaikan secara singkat, langsung dan tidak ambigu.

Pelanggaran maksim cara/pelaksanaan sangat lazim terjadi dalam peristiwa tutur. Berdasarkan hasil penelitian, tuturan yang tidak singkat, tidak jelas, dan cenderung ambigu, sering dilakukan sehingga berdampak pada pelanggaran maksim cara/pelaksanaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muslimin (2014) yang menyatakan bahwa tokoh Igor telah melanggar prinsip-prinsip kerja sama yang dilambangkan dengan berbagai indikator, yaitu redudansi, kurang informatif, di luar topik, ketidakjelasan, ambiguitas, dan ketidakteraturan. Sebagian besar pelanggaran maksim cara/pelaksanaan Grice karena alasan yang berkaitan dengan budaya kesantunan. Informan secara sengaja memilih menggunakan tuturan yang panjang, mengandung ambiguitas, dan disampaikan secara tidak langsung agar tuturan menjadi lebih santun serta tidak membuat mitra tutur menjadi tersinggung dan malu.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama Grice merupakan hal yang lazim terjadi. Perbedaan budaya membuat prinsip kerja sama Grice tidak bisa diterapkan secara universal pada semua bahasa. Pelanggaran prinsip kerja sama Grice bukanlah sebuah keburukan dalam komunikasi, justru pelanggaran tersebut diperlukan karena pengaruh budaya yang ada pada bahasa tersebut. Simpulan di atas diperkuat dengan pernyataan Handono (2017) yang mengatakan bahwa prinsip kerja sama tidak selamanya bisa dipatuhi. Dalam suatu percakapan banyak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama. Namun, pelanggaran tersebut tidak berarti 'kerusakan' atau 'kegagalan' dalam percakapan. Pelanggaran itu justru dilakukan penutur untuk memperoleh efek implikatur dalam tuturan yang diucapkannya, misalnya untuk berbohong, melucu, atau bergurau.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Perbedaan budaya membuat prinsip kerja sama Grice khususnya maksim cara/pelaksanaan tidak bisa diterapkan secara universal pada semua bahasa. Kedua, terdapat sejumlah alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan, yakni alasan kesantunan, bingung memberikan jawaban, lupa, gugup, empati, menghindari tuturan langsung, rahasia, kosakata pengganti, basa-basi, basa-basi, berbohong, kebiasaan, dan kesal/marah. Ketiga, Pelanggaran prinsip kerja sama Grice bukanlah sebuah keburukan dalam komunikasi, justru pelanggaran tersebut terjadi karena pengaruh budaya yang ada pada bahasa tersebut. Keempat, pelanggaran maksim kerja sama Grice pada suatu bahasa merupakan perwujudan dari prinsip kerja sama yang sebenarnya dalam bahasa tersebut.

REFERENSI

- Brown, P., & Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals in Language Use. In *Studies in Interactional Sociolinguistics 4*.
- Chaer, A. (2010). Kesantunan Berbahasa (Issue 1). *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Citra, Y., & Fatmawati. (2021). Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 7(2), 437–448. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1278>
- H. Tupan, A., & Natalia, H. (2008). The Multiple Violations of Conversational Maxims in Lying Done By the Characters in Some Episodes of Desperate Housewives. *K@Ta*, 10(1), 63–78. <https://doi.org/10.9744/kata.10.1.63-78>
- Handono, S. (2017). Implikatur Kampanye Politik dalam Kain Rentang di Ruang Publik. *Aksara*, 29(2), 253–266.
- Leech, G. N. (1983). Principles of Pragmatics. *Longman: Linguistics Library*.

- Lili, Z. (2012). Understanding Humor Based on the Incongruity Theory and the Cooperative Principle. *Studies in Literature and Language*. <https://doi.org/10.3968/j.sll.1923156320120402.3521>
- Muslimin, A. I. (2014). Flouting Maxims and the Implications to Major Characters in Paulo Coelho's *The Winner Stands Alone*. *Journal on English as a Foreign Language*, 4(2), 63–72.
- Norwanto. (2006). A study cooperative principle in Indonesian political language. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 18(35), 127–135.
- Rahmawati, N. (2021). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan Berbahasa Percakapan dalam Acara "Mata Najwa." *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v4i1.9408>
- Rochmawati, D. (2017). Pragmatic and Rhetorical Strategies IN THE English-Written Jokes. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*. <https://doi.org/10.17509/ijal.v7i1.6868>
- Sobhani, A., & Saghebi, A. (2014). The Violation of Cooperative Principles and Four Maxims in Iranian Psychological Consultation. *Open Journal of Modern Linguistics*. <https://doi.org/10.4236/ojml.2014.41009>
- Wenzhong, Z., & Jingyi, L. (2013). A pragmatic study on the functions of vague language in commercial advertising. *English Language Teaching*. <https://doi.org/10.5539/elt.v6n6p103>
- White, A. R. (1990). *Studies in the Way of Words* By Paul Grice Harvard University Press, 1989, 385 pp., £25.95. In *Philosophy* (Vol. 65, Issue 251, pp. 111–113). <https://doi.org/10.1017/S0031819100064330>
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2010). *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Yuma Pustaka.
- Zhao, G. (2015). *The Motivation of Ellipsis*. 5(6), 1275–1279.
- Zienkowski, J. (2011). Discursive Pragmatics: A platform for the pragmatic study of discourse. *Discursive Pragmatics*, 1–13. <https://doi.org/10.1075/hoph.8.01zie>